



DINAS SOSIAL

RENCANA KERJA

TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Jl. WR Supratman No 69

Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

e-mail: dinsoslamandau@gmail.com





BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 112);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
 24. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun

2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);

25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2024-2026 atau 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

12. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
13. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja kegiatan, program, sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).
14. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
15. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.
16. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah yaitu:

- a. sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. mengevaluasi hasil kinerja Perangkat Daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja Perangkat Daerah yaitu:

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPD dan RKPD;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RKPD yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan apabila terjadi Perubahan RKPD.
- (3) Uraian sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau;
- d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;

- o. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- y. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Inspektorat;
- bb. Kecamatan Bulik;
- cc. Kecamatan Lamandau;
- dd. Kecamatan Bulik Timur;
- ee. Kecamatan Delang;
- ff. Kecamatan Sematu Jaya;
- gg. Kecamatan Mentohi Raya;
- hh. Kecamatan Belantikan Raya;
- ii. Kecamatan Batang Kawa; dan
- jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 938

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman Komplek Perkantoran Bukit Hibul
Nanga Bulik 74662

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 870/ 779 /VII/Dinsos.A 2024

TENTANG

RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau tahun 2025, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Prdoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
15. Keputusan MenterinDalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodenfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembar Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932);
23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 938).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025**

- KESATU** : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial;
- KEDUA** : Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal (1) bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 01 Juli 2024





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bagian dan bidang. Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2025.

Nanga Bulik, 01 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lamandau,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE.,M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19781211 200604 1 006



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Sosial.....	II-18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	II-29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	III-1
3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	

**DAFTAR TABEL**

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2018-2023	II-2
Tabel 2.1.2. Alokasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023 RKPD.....	II-3
Tabel 2.1.3. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab. Lamandau Tahun 2023	II-5
Tabel 2.1.4. Faktor Penghambat	II-10
Tabel 2.1.5. Faktor Pendukung.....	II-11
Tabel 2.1.6. Tealisasi Triwulan II Tahun Anggaran 2024	II-14
Tabel 2.2.1 Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Tahun 2021-2023	II-15
Tabel 2.3.1. Kekuatan dan Kelemahan Yang Dihadapi Selama Tahun 2023	II-18
Tabel 2.3.2. Peluang dan Tantangan Yang Dihadapi.....	II-19
Tabel 2.3.3. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	II-21
Tabel 2.3.4. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong	II-22
Tabel 2.3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Isu Strategis Tahun 2024-2026.....	II-24
Tabel 2.4.1. Review Tahun Anggaran 2024 Terhadap Rancangan Awal RKPD dalam Perencanaan Tahun 2025	II-26
Tabel 2.5.1. Penelaahaan Usulan Program Kegiatan Masyarakat.....	II-30
Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	III-2
Tabel 3.3.1. Program Kegiatan Dinas Sosial Kab. Lamandau	III-3
Tabel 4.1. Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Lamandau Tahun 2025	IV-2
Formulir E.81 Evaluasi terhadap hasil Renja PD Dinas Sosial Kab.Lamandau	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja-) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana kerja Perubahan sebagaimana dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap OPD.

Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,



Sserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan rancangan awal renja OPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu dan berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip - prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program kegiatan di dalam renja OPD berdasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan ataupun pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;



- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan atau pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;



19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 932);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 938).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja OPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau;
2. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Sebagai alat ukur kerja instansi.



1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Dinas Sosial

Evaluasi pelaksanaan renja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lamandau adalah penjabaran rencana kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau sebagai pelaksana teknis pembangunan urusan wajib pelayanan dasar di bidang sosial.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan agar sejalan dengan prioritas daerah. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan,



buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Tabel. 2.1.1

Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Tahun 2018-2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022 (RPJMD 2018-2023)			Tahun 2023 (RPJMD 2018-2023)		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan perlindungan dan jaminan sosial, Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan Meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	Persentase penduduk miskin (%)	3,20	3,34	104,37 %	3,15	3,12	99,04 %
		Indeks Gini	0,31	0,32	103,22 %	0,30	0,33	110 %

Sumber : Renstra Tahun 2018-2023

Dari tabel 2.1.1 Menunjukkan bahwa capaian presentase penduduk miskin pada Tahun 2023 sebesar 3,12 dari target 3,15, mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dibandingkan capaian presentase penduduk miskin pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 0,14 poin. Capaian indeks Gini pada tahun 2023 sebesar 0,33, angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,01 poin.



B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1. Evaluasi Program Tahun 2023

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau melaksanakan urusan bidang sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan sasaran meningkatnya perlindungan sosial. Alokasi anggaran untuk tujuan tersebut pada Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar **Rp 7.300.118.151,00** (tujuh milyar tiga ratus juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah) pada perubahan APBD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 5 program utama yaitu guna meningkatkan mutu layanan bidang sosial dan 2 program penunjang urusan pemerintah / urusan rutinitas kantor. Dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Sosial untuk meningkatkan perlindungan sosial di Kabupaten Lamandau, alokasi anggaran dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.1.2

Alokasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023

NO	Program	Anggaran (Rp.)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.317.624.770
2.	Program Pemberdayaan Sosial	917.504.204
3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	89.506.358



4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	144.748.668
5.	Program Penanganan Bencana	819.558.610
6.	Program Rehabilitasi Sosial	1.011.175.541
Total Anggaran		7.300.118.151

Anggaran Dinas Sosial sebesar **Rp 7.300.118.151,00** pada perubahan APBD, terealisasi sebesar **Rp 6.293.556.308,00** atau **86,21 %** yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp.6.103.996.308,-** atau **87,10 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp 7.007.950.453,-**

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar **Rp. 279.560.000,-** atau **96,30 %** dari pagu anggaran sebesar **Rp 290.293.999,-**.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.3.



Tabel 2.1.3

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

NO	BELANJA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KELUARAN			PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI TAHUN 2023				
		OUTPUT/OUTCOMES	VOLUME	SATUAN		VOLUME OUTPUT/OUTCOMES	SATUAN	KEUANGAN		FISIK (%)
								(Rp)	%	
1	2	3			4	5	6	7	8	9
I.	BELANJA OPERASI				7,009,824,152			6,013,996,308	85.79	95,00
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah			4,092,243,830			3,840,735,501	93.85	98,00
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	2,279,736,336			2,213,252,457	97.08	97,08
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	2,279,736,336	14	Bulan	2,213,252,457	97.08	97,08
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	47,687,156			34,729,897	72.83	100,00
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Keseragaman Pakaian ASN	1	Paket	47,687,156	1	Paket	34,729,897	72.83	100,00
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terdidik dan Terlatihnya Sumber Daya Aparatur Secara Formal	10	orang	0	-	Orang	0	-	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran			572,260,365			457,250,927	79.90	98,00
a	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12	Bulan	1,069,603	12	Bulan	500,000	46.75	65,00



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	133,318,252	12	Bulan	95,852,525	71.90	90,00
	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	2,964,623	12	Bulan	1,990,000	67.12	80,00
	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	20,710,000	12	Bulan	14,341,000	69.25	85,00
	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	24,106,887	12	Bulan	20,102,700	83.39	90,00
	f	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	12	Bulan	3,600,000	12	Bulan	3,600,000	100.00	100,00
	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Kedalam Daerah Telaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan Ke luar Daerah	12	Bulan	386,491,000	12	Bulan	320,864,702	83.02	95,00
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran			516,884,973			476,100,520	92.11	98,00
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	5,600,000	12	Bulan	5,036,000	89.93	95,00
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	92,405,700	12	Bulan	79,558,226	86.10	95,00
	c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	418,879,273	12	Bulan	391,506,294	93.47	95,00
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan			675,675,000	-		659,401,700	97.59	95,00
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jaminan perizinan kendaraan dinas / operasional	12	Bulan	11,300,000	12	Bulan	4,369,200	38.67	50,00



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	96,075,000	12	Bulan	94,680,000	98.55	99,00
	c	Pemeliharaan Peralatan dari Mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12	Bulan	20,300,000	12	Bulan	15,480,000	76.26	90,00
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12	Bulan	548,000,000	12	Bulan	544,872,500	99.43	100,00
	B Program Pemberdayaan Sosial					917,627,750			865,376,700	94.31	95.00
	1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					917,627,750			865,376,700	94.31	95.00
	a	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan dan penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin	50	orang	22,679,565	50	Orang	16,211,000	71.48	100,00
	b	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi pendampingan pemberdayaan fakir miskin melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan bantuan KUBE dari Kemensos RI Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi LK3 Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan	2	Orang /lembaga	225,546,257	2	Orang /lembaga	210,863,700	93.49	100,00
	c	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah bantuan UEP bagi masyarakat miskin yang disalurkan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi BPNT	118	Orang	669,401,928	118	Orang	638,302,000	95.35	100,00
	C Program Rehabilitasi Sosial					961,099,386			869,923,207	90.51	99,00



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						961,099,386			869,923,207	90.51	99,00
	a	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima kebutuhan dasar	55	Orang	64,882,524	55	Orang	62,564,500	96.43	100,00		
	b	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Anak terlantar yang dibina Jumlah Lansia yang mendapatkan kebutuhan dasar Jumlah penyandang cacat dan eks trauma yang direhabilitasi	125	Orang	384,494,644	125	Orang	379,041,000	98.58	100,00		
	c	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi JSLU	141	Orang	292,000,726	141	Orang	253,903,122	86.95	95,00		
	d	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang menerima bimbingan mental sosial	25	orang	219,721,492	63	Orang	174,414,585	79.38	252,00		
	D	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				144,748,862			135,387,800	93.53	98,00		
	1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				144,748,862			135,387,800	93.53	98,00		
	a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	50	Keluarga	144,748,862	50	Keluarga	135,387,800	93.53	98,00		
	E	Program Penanganan Bencana				804,597,918			223,008,200	27.72	45,00		
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				804,597,918			223,008,200	27.72	45,00		



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

	a	Penyediaan Makanan	Jumlah Bantuan Sosial Pangan yang didistribusikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	804,597,918	9	orang	223,008,200	27.72	27,72
F		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				89,506,406			79,564,900	88.89	100,00
1		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				89,506,406			79,564,900	88.89	100,00
	a	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Laporan	89,506,406	1	Laporan	79,564,900	88.89	100,00
II.		BELANJA MODAL				290,293,999			279,560,000	96.30	99,00
A		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				290,293,999			279,560,000	96.30	99,00
1		Administrasi Umum Perangkat Daerah				290,293,999			279,560,000	96.30	99,00
	a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Paket	290,293,999	1	Paket	279,560,000	96.30	99,00
	a	Nama Sub Kegiatan								-	-
	b	Nama Sub Kegiatan								-	-
JUMLAH				811		7,300,118,151	789		6,293,556,308	86.21	97.29



Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun 2023 pada Tabel 2.1.3, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada table berikut :

Tabel 2.1.4
Faktor Penghambat

No.	Program / Kegiatan	Faktor Penghambat
1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terdapat 2 kendaraan operasional hibah dari Kementerian Sosial yang pemeliharannya sudah diserahkan kepada Dinas Sosial. Pembayaran Perpanjangan pajak dan STNK tidak dapat dilakukan secara online karena berkas tidak lengkap, sehingga tidak bisa dibayarkan.
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/kota. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Tidak tercapai target dikarenakan di Kabupaten Lamandau pada tahun 2023 tidak banyak terjadi bencana alam dan bencana sosial. Bantuan ini bersifat situasional.
3	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Target tercapai, namun karena harga satuan pada DPA sangat tinggi sedangkan harga lampu di pasaran lebih kecil. Maka anggaran tidak



		terserap karena dibelanjakan sesuai volume.
--	--	---

2. Kinerja Program yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

Tabel 2.1.5
Faktor Pendukung

No.		Program / Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Fakor Pendukung
1.	Program Pembedayaan Sosial		
	a.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya kegiatan sosialisasi LK3 “Kasih Kabupaten Lamandau” di Kecamatan Menthobi Raya karena adanya kerja sama yang baik antara Perangkat Desa Bukit Raya dan Narasumber dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Lamandau.
	b.	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Terjalannya Kordinasi yang baik dengan PSKS dan Penyaluran bantuan hibah kepada lembaga terlaksana karena koordinasi dan komunikasi yang baik antara Dinas Sosial dan penerima hibah.
	c.	Sub Kegiatan Peningkatan	Tersalurnya bansos UEP dan sosialisasi kepada calon



		Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	penerima bansos terlaksana karena koordinasi dan kerjasama yang baik antara Dinas Sosial dan Aparat Desa dan calon KPM
2	Program Rehabilitasi Sosial		
	a.	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Pengadaan Alat Bantu bagi penyandang disabilitas. Kerja sama dengan penyedia barang, koordinasi yang baik Dinas Sosial dengan Aparat Desa dan calon penerima bansos alat bantu.
	b.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya kegiatan HLUN dan penyaluran bansos untuk disabilitas, anak dan lansia terlantar. koordinasi yang baik Dinas Sosial dengan Aparat Desa dan calon penerima bansos.
	c.	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	Pengadaan bantuan sandang untuk disabilitas. Kerjasama dengan penyedia barang, koordinasi yang baik Dinas Sosial dengan Aparat Desa dan calon penerima bansos.



		Masyarakat	
	d.	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyaluran bansos duka/kematian dan orang terlantar sakit. Koordinasi yang baik Dinas Sosial dengan Aparat Desa dan calon penerima bansos.
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial		
	a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Operator SIKS-NG. Koordinasi yang baik Dinas Sosial dengan Aparat Desa.
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		
	a	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Ziarah ke Makam Tokoh Pendiri Kabupaten, Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci dan Upacara Hari Pahlawan. Koordinasi yang baik Dinas Sosial dengan instansi terkait.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1.4 dan Tabel 2.1.5, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2024 yang perlu dilakukan agar seluruh program/kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Sosial dapat dicapai secara maksimal/memenuhi target yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Infentarisasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Menyusun Perencanaan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standart Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Melakukan monitoring, koordinasi dan kerjasama dengan perangkat desa dan PSKS agar pelayanan kepada PMKS dapat diberikan secara maksimal.

2. CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL TAHUN 2024

Pagu Anggaran Dinas Sosial APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp. 7.967.628.339,00. Dijabarkan dalam 6 Program, 15 Program dan 45 Sub Kegiatan. Dari Pagu Anggaran tersebut realisasi pada Triwulan II sebagai berikut :

Tabel 2.1.6

Realisasi Triwulan II Tahun Anggaran 2024

NO	Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.012.427.651	50,05
2.	Program Pemberdayaan Sosial	289.769.450	6,27
3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.095.280.251	36,40
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.537.988.712	12,95



5.	Program Penanganan Bencana	862.503.875	42,88
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	169.648.436	2,43
Total Anggaran		7.967.628.339	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Pelayanan kebutuhan dasar warga Negara bidang sosial yang wajib dipenuhi sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana

A. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial

Tabel. 2.2.1

Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Tahun 2021-2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target	Capaian SPM (%)		
				2021	2022	2023



1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	70,77	81,12	75,51
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	86,67	91,31	76,92
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	90,00	87,16	95,38
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Luar Panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100 %	80,00	90,37	83,24
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/ kota	100 %	80,00	96,20	0,33

B. Fator Pendukung dan Penghambat Capaian SPM

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Personil / pegawai Dinas Sosial

PNS 18 orang dan Non - PNS 15 orang

b. PSKS yang membantu terselenggaranya pelaksanaan kesejahteraan sosial

2. Faktor Penghambat



a. Belum semua kategori layanan dasar urusan wajib sosial dianggarkan pada APBD, rincian sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Sub Kegiatan Penyediaan sandang
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / bukti Kepemilikan NIK
- d. Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- e. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- f. Sub Kegiatan Layanan Rujukan
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan / Layanan Reaksi Cepat
- h. Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan

2. Program Penanganan Bencana

- a. Penyediaan Sandang
- b. Jenis layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana merupakan kondisi dan situasi yang tidak dapat direncanakan / bersifat situasional sehingga target tidak dapat selalu tercapai jika tidak ada atau sedikit terjadi bencana.



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial. Dalam penyelenggaraan urusan Sosial tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Dukungan pemerintah terhadap program pengentasan kemiskinan daerah	Anggrana yang masih terbatas
Memiliki database DTKS	SDM yang belum handal dan berkompeten
	Sarana dan prasaranan yang belum optimal
	Daerah belum memiliki aplikasi yang bersumber dari pendanaan APBD
	Belum memiliki pusat pelayanan urusan sosial

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau yaitu:



Tabel 2.3.2

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Kebijakan pembangunan nasional sejalan dengan prioritas daerah	Wilayah geografis kabupaten Lamandau yang sangat luas, dengan permukiman penduduk yang terpencar dan konektivitas/mobilisasi sangat terbatas.
Koordinasi dan Kerjasama yang terjalin dengan baik dan lancar	Tuntutan masyarakat, akan output yang berkualitas dari database DTKS yang semakin tinggi, sementara situasi untuk memenuhi tuntutan tersebut masih banyak mengalami kendala
	Tuntutan masyarakat, instansi pemerintah dan swasta lainnya untuk memperoleh layanan DTKS yang cepat, tepat sasaran, akurat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan dan dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan output yang dihasilkan Dinas Sosial.

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023, maka strategi pada tahun 2025 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



1. Updating, verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kapasitas PSKS untuk mendata PPKS;
3. Updating, optimalisasi, dan pemanfaatan data indicator kesejahteraan sosial pada aplikasi SIKS-NG, agar penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
4. Mengembangkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk pelayanan data dan penganduan

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Lamandau memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau, maka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas wajib pelayanan dasar. Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Sosial. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial



Kabupaten Lamandau. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Lamandau

No	Masalah Pokok	Rumusan Masah	Akar Masalah
1.	Tingginya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tingkat Kompetensi masyarakat di dunia kerja rendah	Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah
		Pola pikir masyarakat yang belum mau bekerja keras	Masih minimnya minat anak putus sekolah untuk mengikuti pelatihan di PSBR
			Masih minimnya minat wanita yang mengikuti pelatihan di PSKW
		Tingginya Kasus anak bermasalah hukum (ABH)	Bebasnya pergaulan anak dalam dunia nyata/maya
			Kurangnya campur tangan orang tua dalam hal pembentukan pribadi anak
			Minimnya sosialisasi berbasis bahaya dari pergaulan bebas pada anak
		Masih adanya kasus Anak Terlantar pada setiap tahunnya di Kabupaten Lamandau	Kurangnya kesadaran orang tua akan kewajiban terhadap anak
			Kurangnya kesadaran masyarakat Khususnya Orang



			Tua Terhadap Undang-Undang
		Kondisi Lapangan pekerjaan yang kurang memadai	Lapangan pekerjaan didominasi oleh bukan masyarakat asli daerah
2.	Kurang akuratnya data dalam pendataan masyarakat miskin	Partisipasi aparatur desa kurang	Kurang tanggapnya aparatur desa dalam melaksanakan prosedur

B. Telaahan Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026

Tujuan ke 2 dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026. Dinas Sosial Kabupaten Lamandau berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Lamandau perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.3.4
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

NO	Tujuan /Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Etos kerja pegawai dalam pencapaian program dan kegiatan dengan keterbatasan yang ada	Keterbatasan anggaran
		Tersediannya database yang mendukung dalam rangka penentuan pemberian bantuan sosial	Keterbarasan SDM yang handal dan kompeten



		agar tersalurkan tepat saaran	
		Adanya komitmen yang konsisten dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mengngacu pada SOP yang telah dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas	Pola pikir masyarakat yang masih belum maju dan berkembang
		Koordinasi dan Kerjasama yang berjalan dengan baik dan lancar	Pendataan kependudukan yang terkendala
			Beberapa program kegiatan bersifat situasional

1. Pemetaan yang dilakukan SOPD terkait belum cermat dilakukan terhadap kelompok-kelompok penyandang masalah sosial.
2. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada patologi sosial.
3. Penduduk Usia Lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya Usia Harapan Hidup (UHH), namun tidak banyak tercover oleh pemerintahan dalam penangannya.
4. Tingginya angka kriminalitas pada anak yang salah satunya disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak



dalam keluarga menjadi perhatian besar bagi Dinas Sosial dalam penanganannya.

C. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial dan Isu Strategis Tahun 2024-2026

No	Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Sosial	Keterbatasan Anggaran dan SDM yang handal dan Kompeten	Peningkatan Penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial Mencegah kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan mengarah pada



			patologi sosial
		Pola Pikir Masyarakat yang masih belum maju dan berkembang	Mencegah tingginya angka kriminalitas pada anak yang disebabkan oleh putus sekolah dan keterlantaran anak dalam keluarga
		Pendataan Kependudukan yang terkendala	Optimalisasi penanganan dan masalah data penduduk usia lanjut yang terus meningkat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Sosial melaksanakan urusan bidang sosial, berdasarkan indikator SPM melakukan pelayanan dasar kepada penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti dan tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana. Pagu indikatif Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.178.746.824. Anggaran ini cukup untuk melaksanakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial.

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau pencapaian terkait target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial pada Tahun 2025.



Tabel 2.4.1
Review Tahun Anggaran 2024 terhadap Rancangan Awal RKPD
dalam Perencanaan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Review Anggaran 2024						Hasil Analisis Kebutuhan Anggaran Rancangan Awal RKPD 2025					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota										
1	Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	24.360.800	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	24.360.872	
2	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	2.150.678.509	Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	2.144.998.495	
3	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	72.080.000	Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	72.115.520	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	527.161.113	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	544.566.953	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	86.400.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	484.499.880	



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N.Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	496.577.229	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	491.636.321	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N.Bulik	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	655.170.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamadau	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 %	151.681.678	
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
1	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Kab. Lamadau	Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	100 %	19.983.000	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Kab. Lamadau	Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	100 %	20.000.000	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	100 %	1.537.998.712	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah DTKS yang diverifikasi dan divalidasi	100 %	869.450.980	
3	Program Penanganan Bencana										
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100 %	822.212.875	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Persentase korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial	100 %	982.248.403	
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 orang	40.291.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap siagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	30 orang	40.301.600	
4	Program Rehabilitasi Sosial					Program Rehabilitasi Sosial					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar panti Sosial	Kab. Lamadau	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standart gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	722 orang	880.052.465	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar panti Sosial	Kab. Lamadau	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standart gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	722 orang	944.761.547	
5	Program Pemberdayaan Sosial										
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	12 Dokumen	14.248.150	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan	12 Dokumen	10.000.000	



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

			penerbitan izin udian berhadiah dan pengumpulan uang atau barang					izin udian			
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah PSKS yang diperdagangkan	7 PSKS	275.521.300	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Jumlah PSKS yang diperdagangkan	7 PSKS	343.563.493	
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										
1	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Presentase sarana dan prasarana Taman makam Pahlawan yang dalam kondisi baik	100 %	169.648.436	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Kab. Lamadau	Presentase sarana dan prasarana Taman makam Pahlawan yang dalam kondisi baik	100 %	165.614.276	



2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan adalah upaya-upaya untuk mencapai kondisi yang lebih baik secara terencana demi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dengan pendekatan perencanaan pembangunan bawah-atas (bottom-up) yang artinya perencanaan dari masyarakat ke pemerintah daerah yang dilakukan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musrenbang dilaksanakan mulai tingkat desa/kel yang dihadiri oleh elemen masyarakat, tingkat kecamatan yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) dan tingkat kabupaten. Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat, Dinas Sosial perlu memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi serta kemampuan anggaran dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat usulan aspirasi rincian pada table 2.5.1.



Tabel 2.5.1

Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

NO	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	STATUS	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUB KEGIATAN
1	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Bantuan Paket Sembako Lansia atau Bantuan RASTRA	Desa Mekar Mulya ,	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Usulan disetujui sesuai dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Sematu Jaya	Dimohon untuk melengkapi persyaratan sebagaimana SOP yang ada pada OPD teknis dengan berkoordinasi dengan pihak perangkat desa/kelurahan, terdapat 155 kuota untuk penerima bantuan paket permakanan lansia	-	155	Orang	174.098.565	Penyediaan Permakanaan



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

	Bantuan Peralatan/P erengkapan bagi peserta pelatihan ketrampilan	Pelatihan Keterampilan Anggota Karang Taruna	Desa Samu Jaya, Kab. Lamandau	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Setuju diteruskan keforum perangkat Daerah sesuai hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan.	Dimohon untuk melengkapi proposal sebagai persyaratan awal penerima bantuan Hibah, mengingat selama ini Dinsos tidak pernah memberikan bantuan peralatan/perengkapan bagi peserta pelatihan. Namun lebih cenderung ke Bantuan Hibah uang kepada lembaga.	-	3	Lembaga	215.009.197	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota
2	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	bantuan alat dengar	Desa Suja Rt 002,	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Setuju diteruskan keforum perangkat Daerah sesuai hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan.	Dimohon untuk melengkapi persyaratan sebagaimana SOP yang ada pada OPD teknis dengan berkoordinasi dengan pihak	-	55	Unit	74.882.070	Penyediaan Alat Bantu



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

							perangkat desa/kelurahan.					
	Penyediaan Alat Bantu untuk penyandang disabilitas	Bantuan Alat Bantu untuk Disabilitas	Desa Lopus	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Setuju untuk dilanjutkan ke Forum SKPD sesuai dengan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Dimohon untuk mempertegas jenis alat bantu yang dibutuhkan, mengingat terdapat 5 jenis alat bantu berupa alat bantu dengar, kursi roda, tongkat kruk, tongkat walker kaki 4 dan tongkat walker lipat.	-	55	Unit	74.882.070	Penyediaan Alat Bantu
3	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penambahan/Peningkatan Kuota Bantuan Sosial bagi warga Miskin di Lopus	Desa Lopus	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Setuju untuk dilanjutkan ke Forum SKPD sesuai dengan hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Dimohon untuk melengkapi proposal sebagai persyaratan awal, yang nanti akan dilakukan verifikasi lapangan oleh tim dari OPD Teknis	-	118	KPM	705.495.230	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

4	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	BANTUAN WARGA KURANG MAMPU	RT. 007/ RW. 003 DESA JANGKA R PRIMA	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Usulan disetujui sesuai dengan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Sematu Jaya	Dimohon untuk melengkapi proposal sebagai persyaratan awal, yang nanti akan dilakukan verifikasi lapangan oleh tim dari OPD Teknis	-	118	KPM	705.495.230	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
5	Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penambahan Bantuan Kuota Penerima Bantuan Sosial (BANSOS)	Desa Nyalang,	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Usulan diterima sesuai dengan hasil musrembang RKPD di kecamatan	Dimohon untuk melengkapi proposal sebagai persyaratan awal, yang nanti akan dilakukan verifikasi lapangan oleh tim dari OPD Teknis	-	118	KPM	705.495.230	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

6	Penyediaan Alat Bantu untuk penyandang disabilitas	Untuk membantu agar lebih mempermudah aktivitas.	Jalan batu batungkat, Kab. Lamandau	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Usulan diterima sesuai dengan hasil musrembang RKPD di kecamatan	Dimohon untuk mempertegas jenis alat bantu apa yang dibutuhkan, mengingat terdapat 5 jenis alat bantu berupa alat bantu dengar, kursi roda, tongkat kruk, tongkat walker kaki 4 dan tongkat walker lipat.	-	55	Unit	74.882.070	Penyediaan Alat Bantu
7	Penyediaan Alat Bantu untuk penyandang disabilitas	Bantuan Alat Pendengar Bagi Tuna Rungu dan Tongkat	Desa Sekombulan, Kab. Lamandau	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Usulan diterima sesuai dengan hasil musrembang RKPD di kecamatan	Dimohon untuk melengkapi persyaratan sebagaimana SOP yang ada pada OPD teknis dengan berkoordinasi dengan pihak perangkat desa/kelurahan	-	55	Unit	74.882.070	Penyediaan Alat Bantu



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

8	Penyediaan Alat Bantu untuk penyandang disabilitas	Bantuan Kursi Roda	Desa Sekombulan, Kab. Lamandau	Verifikasi TAPD	Setuju untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke OPD Tujuan	Usulan diterima sesuai dengan hasil musrembang RKPD di kecamatan	Dimohon untuk melengkapi persyaratan sebagaimana SOP yang ada pada OPD teknis dengan berkoordinasi dengan pihak perangkat desa/kelurahan	-	55	Unit	74.882.070	Penyediaan Alat Bantu
---	--	--------------------	--------------------------------	-----------------	---	--	--	---	----	------	------------	-----------------------



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sasaran pembangunan RKP 2025 antara lain meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju, mengurangi kemiskinan menuju nol persen, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta pengaruh internasional. Selain pertumbuhan ekonomi, RKP 2025 juga menekankan pentingnya pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 7–8 persen dan rasio Gini menjadi 0,379–0,382 pada tahun depan. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, dan mendorong konvergensi program antar lembaga. Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan jaminan sosial.

RKP 2025 juga berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38,6 persen. Hal ini akan dicapai melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, seperti peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan rancangan RKP 2025 ini, pemerintah berharap dapat mengatasi tantangan sosial-ekonomi secara lebih komprehensif dan mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif serta berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam RKP tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas nasional maka Dinas Sosial Kabupaten Lamandau akan mengambil langkah strategis yaitu - dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Lamandau tahun 2025 dalam RPD Tahun 2024-2026 adalah “ Pengelolaan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan terkendali ” dengan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan sumber daya manusia yang unggul;



2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perekonomian secara inklusif serta kelestarian lingkungan hidup;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintah dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

Memperhatikan Tema pembagunan daerah dan tujuan daerah Kabupaten Lamandau tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2025, maka tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Presentase Penduduk Miskin	3,06 %
			Presentase Penduduk Miskin yang Memperoleh Perlindungan Sosial	43 %

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Program dan kegiatan Dinas Sosial merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial ke dalam rencana kerja kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Sosial. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pendanaan indikatif



sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kab. Lamandau, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana kerja program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Dinas Sosial Kab. Lamandau tahun 2025 dengan jumlah 6 Program, 15 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.1 Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan (terlampir).

Adapun data yang diperoleh dari menghitung jumlah program kegiatan sub kegiatan di tabel renja 2025 SIPD RI yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.3.1

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau

NO	PROGRAM	INDIKATOR	KEGIATAN	INDIKANTOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PERKIRAAN PAGU (RP)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase meningkatnya pelayanan pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,360,872
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,144,998,495
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42,115,520
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30,000,000



			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13,000,000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	59,563,308
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2,964,623
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19,110,000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22,430,404



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3,600,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	423,898,618
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	460,000,000
					Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20,000,000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,499,880



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,600,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	68,908,200
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	417,128,121
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11,300,000



					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96,580,000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20,300,000
					Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23,501,676
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10,000,000



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mendapat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25,851,577
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	50,831,577
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26,019,565
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	215,009,197



					Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	25,851,577
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	174,098,565



				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	74,882,070
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	46,995,977
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	583,540,135



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	65,244,800
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan layanan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000
					Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	51,199,095



					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	112,756,655
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	705,495,230
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sosial	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	458,648,403
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota	6,800,000



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	510,000,000
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	6,800,000
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40,301,600



Rencana Kerja Dinsos Kabupaten Lamandau 2025

6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Dalam Kondisi Baik	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	20,000,000
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	10,000,000
					Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24,561,084
JUMLAH							7,178,746,824



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah 2025. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Adapun rencana Program dan Kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. LAMANDAU
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						7.178.746.824,00							6.743.872.438,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.178.746.824,00							6.743.872.438,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.178.746.824,00							6.743.872.438,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	3.913.859.717,00						-	3.473.985.331,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	24.360.872,00			-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-	-	24.360.872,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				12 Dokumen	24.360.872,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		24.360.872,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.144.998.495,00			-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-	-	2.198.623.457,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				22 Orang/bulan	2.144.998.495,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		2.198.623.457,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	72.115.520,00			-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-	-	52.115.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	42.115.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		42.115.520,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	30.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	544.566.953,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	487.289.281,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	13.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		3.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	59.563.308,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		59.563.308,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				12 Paket	2.964.623,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		2.964.623,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	19.110.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		19.110.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	22.430.404,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		22.430.404,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		3.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				210 Laporan	423.898.618,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		376.620.946,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	484.499.880,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	24.499.880,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	460.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	4.499.880,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		4.499.880,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	491.636.321,00			-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-	-	491.636.321,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.600.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		5.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	68.908.200,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		68.908.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	417.128.121,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		417.128.121,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.681.676,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	-	195.460.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				12 Unit	11.300.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		11.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	96.580.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-		153.860.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				35 Unit	20.300.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		20.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	23.501.676,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			-	353.563.493,00						-	358.563.493,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	36 Dokumen			-	10.000.000,00			-	Mewujudka n fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berk esinambun gan	-	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>	36 Dokumen			12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	7 PSKS			-	343.563.493,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	7 PSKS	343.563.493,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	3 Orang			1 Orang	25.851.577,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1 Orang	25.851.577,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	24 Orang			8 Orang	50.831.577,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	8 Orang	50.831.577,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	150 Keluarga			50 Keluarga	26.019.565,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	50 Keluarga	26.019.565,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	9 Lembaga			3 Lembaga	215.009.197,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	3 Lembaga	215.009.197,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	165 Orang			55 Orang	74.882.070,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	55 Orang	74.882.070,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	30 Orang			10 Orang	46.995.977,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10 Orang	46.995.977,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
			<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1395 Orang			465 Orang	583.540.135,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	465 Orang	583.540.135,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	111 Orang			37 Orang	65.244.800,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	37 Orang	65.244.800,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			-	889.450.980,00						-	889.450.980,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	383 Orang			-	20.000.000,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	383 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1056 Orang			352 Orang	10.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	352 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
			<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	93 Orang			31 Orang	10.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	31 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	100 Persen			-	869.450.980,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100 Persen	869.450.980,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>	5100 Orang			1700 Orang	51.199.095,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1200 Orang	51.199.095,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>	4866 Keluarga			1622 Keluarga	112.756.655,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1622 Keluarga	112.756.655,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			<i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	354 Keluarga			118 Keluarga	705.495.230,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	118 Keluarga	705.495.230,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			-	1.022.550.003,00						-	1.022.550.003,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	100 Persen			-	982.248.403,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100 Persen	982.248.403,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	30018 Orang			10006 Orang	458.648.403,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	10006 Orang	458.648.403,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	36 Unit			12 Unit	6.800.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	12 Unit	6.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	210 Orang			70 Orang	510.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	70 Orang	510.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1500 Orang			500 Orang	6.800.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	500 Orang	6.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	30 Orang			-	40.301.600,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	30 Orang	40.301.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	90 Orang			30 Orang	40.301.600,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	30 Orang	40.301.600,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	54.561.084,00						-	54.561.084,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	100 Persen			-	54.561.084,00			-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	100 Persen	54.561.084,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>	2 Makam			2 Makam	10.000.000,00	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan	-	2 Makam	10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan			1 Laporan	24.561.084,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	1 Laporan	24.561.084,00	DINAS SOSIAL
J U M L A H								7.178.746.824,00							6.743.872.438,00	



BAB V
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamandau Nomor 23 Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Penyusunan rencana kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya rencana kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, perorganisasian serta bahan evaluasi dan *feedback* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025. Pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 01 Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lamandau,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19781211 200604 1 006



LAMPIRAN

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota Lamandau
 Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lamandau
 Periode Pelaksanaan : Triwulan II

Indikator dan Target Kinerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD :

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	Meningkatnya kemandirian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																						
		Bidang Sosial		20,478,828,105		6,013,996,308		7,590,944,539	14.91	1,131,840,350		2,953,121,312					38.33	2,909,335,259		8,923,331,567.00		2,334,419,487	Dinsos	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	10,426,847,999	93.85	3,840,735,501	100 Persen	3,656,051,851	23.64	864,188,908	52.90	1,934,033,517				52.90	1,934,033,517		5,774,769,018.00		1,624,188,755	Dinsos	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	73,082,616	0	-	100 Persen	24,360,800	22.93	5,586,050	34.79	8,476,050				34.79	8,476,050		8,476,050.00		2,119,013	Dinsos	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	73,082,616	0	0	12 Dokumen	24,360,800	22.93	5,586,050	34.79	8,476,050				34.79	8,476,050		8,476,050.00		2,119,013	Dinsos	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	66 Orang/Bulan	6,436,303,410	97.08	2,213,252,457	22 Orang/Bulan	2,150,678,509	30.33	652,386,394	69.50	1,494,673,707				69.50	1,494,673,707		3,707,926,164.00		926,981,541	Dinsos	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	6,436,303,410	97.08	2,213,252,457	22 Orang/Bulan	2,150,678,509	30.33	652,386,394	69.50	1,494,673,707				69.50	1,494,673,707		3,707,926,164.00		926,981,541	Dinsos	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	138,846,560	72.83	34,729,897	100 Persen	72,080,000	26.36	19,000,000	26.36	19,000,000				26.36	19,000,000		53,729,897.00		13,432,474	Dinsos	
		Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	126,346,560	72.83	34,729,897	1 Paket	62,080,000	30.61	19,000,000	30.61	19,000,000				30.61	19,000,000		53,729,897.00		13,432,474	Dinsos	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	12,500,000	0	0	17 Orang	10,000,000	0.00	0	0.00	0				0.00	0		-		-	Dinsos	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,605,055,014	79.90	457,250,927	12 Bulan	525,546,113	19.50	102,503,576	32.16	169,037,519				32.16	169,037,519		626,288,446.00		156,572,112	Dinsos	
		Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	19,000,000	46.75	500,000	12 Bulan	2,674,270	0.00	0	0.00	0				0.00	0		500,000.00		125,000	Dinsos	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	178,689,924	71.90	95,852,525	12 Bulan	50,103,563	15.61	7,823,000	30.98	15,522,475				30.98	15,522,475		111,375,000.00		27,843,750	Dinsos	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	8,893,869	69.12	1,990,000	12 Bulan	1,436,280	0.00	0	0.00	0				0.00	0		1,990,000.00		497,500	Dinsos	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	57,330,000	69.25	14,341,000	12 Bulan	19,105,000	8.36	1,597,000	8.36	1,597,000				8.36	1,597,000		15,938,000.00		3,984,500	Dinsos	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	67,291,212	83.39	20,102,700	12 Bulan	22,251,000	4.65	1,035,000	21.91	4,876,000				21.91	4,876,000		24,978,700.00		6,244,675	Dinsos	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 Dokumen	14,400,000	100.00	3,600,000	12 Bulan	7,200,000	0.00	0	0.00	0				0.00	0		3,600,000.00		900,000	Dinsos	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630 Laporan	1,259,450,009	83.02	320,864,702	12 Bulan	422,776,000	21.77	92,048,576	34.78	147,042,044				34.78	147,042,044		467,906,746.00		116,976,687	Dinsos	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			118,999,760	0.00	0		26,820,000	0.00	0	0.00	0				0.00	0		-		-	Dinsos	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	60,000,000	0.00	0	5 Unit	26,820,000	0.00	0	0.00	0				0.00	0		-		-	Dinsos	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	58,999,760	0.00	0	5 Unit	0	0.00	0	0.00	0				0.00	0		-		-	Dinsos			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100 Persen	1,474,908,963	92.11	476,100,520	100 Persen	496,577,229	15.14	75,197,888	36.30	180,261,941				36.30	180,261,941		656,362,461.00		164,090,615	Dinsos			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	16,800,000	89.93	5,036,000	12 Laporan	5,600,000	17.86	1,000,000	44.64	2,500,000				44.64	2,500,000		7,536,000.00		1,884,000	Dinsos			

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=6+12		14=13/5x100%				
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	206,724,600	68,10	79,558,226	12	Laporan	68,907,600	21.86	15,064,627	38.16	26,296,466					38.16	26,296,466			105,854,692.00	26,463,673	Dinsos
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	1,251,384,363	93,47	391,506,294	12	Laporan	422,069,629	14.01	59,133,261	35.89	151,465,475					35.89	151,465,475			542,971,769.00	135,742,942	Dinsos
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	Persen	579,651,676	97.59	659,401,700	100	Persen	411,170,000	2.31	9,515,000	15.22	62,584,300					15.22	62,584,300			721,986,000.00	180,496,500	Dinsos
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21	Unit	33,900,000	38,67	4,369,200	7	Unit	11,300,000	0.00	0	13.03	1,472,300				13.03	1,472,300			5,841,500.00	1,460,375	Dinsos	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	11	Unit	404,300,000	98.55	94,680,000	4	Unit	115,570,000	8.23	9,515,000	26.71	30,870,000				26.71	30,870,000			125,550,000.00	31,387,500	Dinsos	
		Pemeliharaan Peralatan dari Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105	Unit	60,900,000	76.26	15,480,000	35	Unit	20,300,000	0.00	0	10.06	2,042,000				10.06	2,042,000			17,522,000.00	4,380,500	Dinsos	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi kantor	3	Unit	80,551,676	99.43	544,872,500	1	Unit	264,000,000	0.00	0	10.68	28,200,000				10.68	28,200,000			573,072,500.00	143,268,125	Dinsos	
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM PSKS yang diberdayakan	75	Persen	1,045,460,994	94.31	865,376,700	75	Persen	289,769,450	1.61	4,651,400	6.27	18,156,400					6.27	18,156,400			883,533,100.00	220,883,275	Dinsos
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	Dokumen	14,248,285	0	0	12	Dokumen	14,248,150	0.00	0	0.00	0					0.00	0			-	-	Dinsos
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12	Dokumen	14,248,285	0	0	12	Dokumen	14,248,150	0.00	0	0.00	0					0.00	0			-	-	Dinsos
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan	7	PSKS	1,031,212,709	94.31	865,376,700	7	PSKS	275,521,300	1.69	4,651,400	6.59	18,156,400					6.59	18,156,400			883,533,100.00	220,883,275	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mendapat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3	orang	68,369,668	0	0	1	orang	16,666,400	0.00	0	0.00	0					0.00	0			-	-	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang /lembaga	144,789,668	0	0	8	Orang/Lembaga	43,126,400	10.79	4,651,400	42.10	18,156,400					42.10	18,156,400			18,156,400.00	4,539,100	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150	Keluarga	84,754,114	71.48	16,211,000	50	Keluarga	32,669,500	0.00	0	0.00	0					0.00	0			16,211,000.00	4,052,750	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9	Lembaga	645,027,591	93.49	210,863,700	3	lembaga	146,497,000	0.00	0	0.00	0					0.00	0			210,863,700.00	52,715,925	Dinsos
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	120	Sertifikat	88,271,668	95.35	638,302,000	40	Sertifikat	36,562,000	0.00	0	0.00	0					0.00	0			638,302,000.00	159,575,500	Dinsos

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Peragkat Daerah pada Tahun 2024		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=6+12		14=13/5x100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pasien rehabilitasi yang mendapatkan pembinaan	87	Persen	2,834,284,641	90,51	869,923,207	87 persen	1,095,280,215	5.88	64,424,800	36.40	398,678,800					36.40	398,678,800	1,268,602,007.00		317,150,502	Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pasien rehabilitasi yang mendapatkan bantuan sosial	722	Orang	2,834,284,641	90,51	869,923,207	722 Orang	1,075,297,215	5.99	64,424,800	37.08	398,678,800					37.08	398,678,800	1,268,602,007.00		317,150,502	Dinsos
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	465	Orang	522,295,695	0	0	155 Orang	432,508,500	0.00	0	61.55	266,193,300					61.55	266,193,300	266,193,300.00		66,548,325	Dinsos
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	165	Orang	224,646,210	96,43	62,564,500	55 Orang	65,794,465	0.00	0	0.00	0					0.00	0	62,564,500.00		15,641,125	Dinsos
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang	140,987,931	98,58	379,041,000	10 Orang	51,879,500	19.83	10,288,600	40.95	21,246,600					40.95	21,246,600	400,287,600.00		100,071,900	Dinsos
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1395	Orang	1,750,620,405	86,95	253,903,122	465 Orang	329,870,000	4.46	14,714,900	17.32	57,119,500					17.32	57,119,500	311,022,622.00		77,755,656	Dinsos
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	111	orang	195,734,400	79,38	174,414,585	37 Orang	195,244,750	20.19	39,421,300	27.72	54,119,400					27.72	54,119,400	228,533,985.00		57,133,496	Dinsos
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Bantuan Program keluarga Harapan (PKH)	100	Persen	2,668,352,940		135,387,800	100 Persen	1,557,981,712	1.70	26,445,940	12.95	201,784,740					12.95	201,784,740	337,172,540.00		3,445,700	Dinsos
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan layanan Kewenangan Kabupaten/Kota	383	Orang	60,000,000	0	0	383 Orang	19,983,000	0.00	0	34.49	6,891,400					34.49	6,891,400	6,891,400.00		1,722,850	Dinsos
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	1056	Orang	30,000,000	0	0	352 Orang	9,997,000	0.00	0	22.41	2,240,000					22.41	2,240,000	2,240,000.00		560,000	Dinsos
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	93	Orang	30,000,000	0	0	31 Orang	9,986,000	0.00	0	46.58	4,651,400					46.58	4,651,400	4,651,400.00		1,162,850	Dinsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Bantuan Program keluarga Harapan (PKH)	100	Persen	2,608,352,940	93,53	135,387,800	100 Persen	1,537,998,712	1.72	26,445,940	12.67	194,893,340					12.67	194,893,340	330,281,140.00		82,570,285	Dinsos
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5100	Orang	153,597,285	0	0	2200 Orang	74,525,500	0.00	0	62.08	46,262,000					62.08	46,262,000	46,262,000.00		11,565,500	Dinsos
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4866	Keluarga	338,269,965	93,53	135,387,800	1622 Keluarga	268,398,712	3.80	10,187,240	42.80	114,863,440					42.80	114,863,440	250,251,240.00		62,562,810	Dinsos
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan kabupaten/Kota	354	KPM	2,116,485,690	0	0	118 KPM	1,195,074,500	1.36	16,258,700	2.83	33,767,900					2.83	33,767,900	33,767,900.00		8,441,975	Dinsos
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban pasca bencana yang mendapatkan pembinaan dan bantuan sosial	100	Persen	3,067,650,009	27,72	223,008,200	100 Persen	822,212,875	20.43	167,998,600	44.79	368,301,100					42.88	352,551,100	575,559,300.00		147,827,325	Dinsos
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100	Persen	2,946,745,209	27,72	223,008,200	100 Persen	822,212,875	20.43	167,998,600	42.88	352,551,100					40.96	336,801,100	559,809,300.00		147,827,325	Dinsos

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024		Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13=6+12		14=13/5x100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	30018 orang	1,375,945,209	27,72	223,008,200	10006 Orang	499,607,875	2.70	13,501,100	30.93	154,551,100					30.93	154,551,100	377,559,300.00	94,389,825	Dinsos		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsi Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Unit	20,400,000	0	0	12 Unit	6,799,000	0.00	0	0.00	0					0.00	0	-	-	Dinsos		
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	1,530,000,000	0	0	70 Orang	309,007,000	50.00	154,497,500	58.98	182,250,000					58.98	182,250,000	182,250,000.00	45,562,500	Dinsos		
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang	20,400,000	0	0	500 Orang	6,799,000	0.00	0	0.00	0					0.00	0	-	-	Dinsos		
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	120,904,800	0	0	30 Orang	40,291,000	0.00	0	39.09	15,750,000					39.09	15,750,000	15,750,000.00	3,937,500	Dinsos		
		Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	120,904,800	0	0	30 Orang	40,291,000	0.00	0	39.09	15,750,000					39.09	15,750,000	15,750,000.00	3,937,500	Dinsos		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang dalam	100 Persen	436,231,522	88,89	79,564,900	100 Persen	169,648,436	2.43	4,130,702	18.96	32,166,755					2.43	4,130,702	83,695,602.00	20,923,901	Dinsos		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Dalam Kondisi Baik	100 Persen	436,231,522		79,564,900	100 Persen	169,648,436	2.43	4,130,702	18.96	32,166,755					2.43	4,130,702	83,695,602.00	20,923,901	Dinsos		
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Dokumen	332,548,270	0	0	1 Dokumen	125,051,160	0.00	0	1.47	1,840,000					0.00	0	-	-	Dinsos		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	30,000,000	0	0	2 Makam	20,000,000	0.00	0	100.00	20,000,000					0.00	0	-	-	Dinsos		
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Laporan	73,683,252	88,89	79,564,900	1 laporan	24,597,276	16.79	4,130,702	41.98	10,326,755					16.79	4,130,702	83,695,602.00	20,923,901	Dinsos		
Rata-rata capaian Kinerja (%)																								
Predikat Kinerja																								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota berikutnya*):																								

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Indeks Gini	0,318	0,302	0,290	0,280	0,33			Capaian Realisasi menggunakan data 2023, karena belum ada perhitungan di tahun 2024
2	Persentase Penduduk Miskin	3,34	3,2	3,06	2,92	3,12			
3	Persentase Penduduk Miskin yang memperoleh perlindungan sosial	41	42	43	44	2,5			Capaian di TW I masih rendah dikarenakan kegiatan bersifat situasional dan angkas tersedia pada TW berikutnya

Sumber RPD Kab. Lamandau Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
Sosial										
1	Jumlah Lansia, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim yang mendapatkan bantuan sosial berbentuk kartu layanan	Orang	305	0						
2	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	2928	65						
3	Jumlah anak terlantar/putus sekolah yang mengikuti pelatihan di PSBR dan PSKW	Orang	23	3						
4	Jumlah lansia yang mendapatkan paket permakanan	Orang	155	0						